



Penyerahan janji setia Pancasila dan NKRI di DPRD DIY.

KR-Atik Widyastuti H

## TANDATANGANI PERJANJIAN DPRD DIY Setia kepada NKRI-Pancasila

**YOGYA (KR)** - Sebanyak 45 anggota DPRD DIY menandatangani janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila. Naskah yang sudah ditandatangani itu, kemudian diserahkan kepada Forum Selamatkan NKRI di halaman DPRD DIY, Jumat (13/5).

Ada tiga poin janji setia NKRI-Pancasila untuk anggota DPRD DIY. Tetap setia dan mempertahankan NKRI serta Pancasila, baik sebagai anggota dewan, anggota partai politik maupun warga negara Indonesia.

Selain itu, anggota DPRD DIY juga berjanji menolak upaya siapapun yang ingin mengganti dan mengubah bentuk negara, ideologi selain Pancasila serta tidak memfasilitasi upaya kampanye ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, baik se-

bagi pribadi maupun keterwakilan.

Naskah yang telah ditandatangani diserahkan perwakilan dari Sekretarisariat DPRD DIY kepada tim Forum Selamatkan NKRI.

Tanda tangan itu dibuat sebagai bentuk perlawanan terhadap aksi yang berlangsung 27 April lalu, dimana ada sejumlah oknum yang menyerukan paham non Pancasila.

"Dari 55 anggota dewan, sudah ada 45 anggota yang telah tanda tangan menyatakan janji setia

kepada NKRI dan Pancasila. Sedangkan 10 anggota yang lain, sedang ada tugas di luar," kata Turtati, perwakilan Sekretarisariat DPRD DIY.

Koordinator Forum Selamatkan NKRI Kuss Indarto mengatakan, pihaknya ingin memastikan semua wakil rakyat di DPRD DIY masih memiliki komitmen yang sama kepada NKRI dan ideologi Pancasila. Pihaknya tak ingin aksi seperti yang terjadi pada 27 April lalu terjadi lagi. Apalagi di gedung wakil rakyat.

Janji setia kepada NKRI dan Pancasila sebelumnya disampaikan ke DPRD DIY pada 10 Mei lalu barengan dengan audiensi Forum Selamatkan NKRI. Beberapa tokoh hadir saat itu. Salah satunya anggota DPR Drs HM Idham Samawi dan budayawan Ahmad Charis Zubair.

"Hari ini (kemarin) kami melakukan serah terima tanda tangan dari seluruh anggota DPRD DIY tetap setia kepada NKRI dan ideologi Pancasila. Kami sudah serahkan form ini pada 10 Mei lalu dan hari ini kami terima lagi dari DPRD DIY. Ada 45 yang sudah tanda tangan dan ada 10 lagi yang akan disusulkan oleh Sekretarisariat DPRD DIY," jelasnya. (Awh)-f

## Perlu Diantisipasi, Dampak Psikologis-Politis PMK

**PURWOKERTO (KR)** - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, dampak psikologis maupun dampak politik yang dapat muncul dari penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi harus diantisipasi, menjelang ibadah kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah.

"Ini (PMK, red) sesuatu yang tidak sederhana, yang tidak bisa kita pandang sebagai masalah yang bisa kita selesaikan secara sambil lalu, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah kurban terutama kaitannya dengan kesehatan hewan kurban," kata Abdul Mu'ti di Purwokerto, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Tengah, Jumat (13/5).

Abdul Mu'ti mengatakah hal itu usai acara Halalbihalal Silaturahmi Idul Fitri 1443 H dan Mangayubagyo Jemaah Calon

Haji Keluarga Besar Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) di Auditorium Ukhuwah Islamiyah UMP.

Menurut Abdul Mu'ti, kasus PMK juga akan menimbulkan dampak psikologis dan dampak politik bagi masyarakat kalau tidak segera teratasi. Karena itu, pihaknya mengimbau kepada Pemerintah khususnya Kementerian Pertanian untuk segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar persoalan yang sekarang ini terjadi dapat segera teratasi.

"Memang kasusnya kecil-kecil, tetapi ini penyebarannya bisa sangat cepat karena faktor yang sebagian disebabkan oleh virus dan itu bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan berdampak sangat luas. Dampak psikologis dan dampak politik ini juga perlu diantisipasi," katanya menegaskan.

Guru Besar Bidang Pendidikan Agama Islam Universitas

Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengaku jika ada yang menyampaikan kepadanya, bahwa kasus PMK tersebut dikhawatirkan sebagai bagian dari permainan para importir, karena sapi-sapi itu tidak sehat kemudian menjadi alasan untuk pemenuhan hewan kurban oleh kelompok-kelompok tertentu guna mengimpor sapi dari luar negeri.

"Tapi saya tidak mau terlalu jauh spekulasi seperti itu. Tapi apa pun, saya kira menjadi tanggung jawab Pemerintah dan kita bersama, juga dengan cara kita masing-masing bisa membantu bagaimana persoalan sapi ini bisa segera teratasi, sehingga umat Islam tetap melaksanakan ibadah kurban dan menyembelih hewan kurban yang sehat sesuai dengan ketentuan dari ajaran agama Islam," kata Abdul Mu'ti. (Ant)-f

## PENJABAT BUPATI KULONPROGO-WALIKOTA Sultan: Tunggu Keputusan Kemendagri

**YOGYA (KR)** - Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, meski sudah menyiapkan enam nama Calon Penjabat Bupati Kulonprogo dan Walikota Yogyakarta, namun belum bisa menyebutkan namanya.

Karena kepastian siapa yang akan ditunjuk sebagai penjabat sepenuhnya ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk itu sampai saat ini Pemda DIY masih menunggu keputusan pemerintah pusat tersebut. "Pemda masih menunggu kepastian nama-nama yang akan ditunjuk dari Kemendagri.

Memang kami sudah mengajukan enam nama ke Kemendagri, tapi sampai saat ini belum keluar. Kalau nama-namanya siapa, *aku raise nyebutke*. Pokoknya nanti penjabat itu dari tingkat 1 (pejabat Pemda DIY). Bisa asisten atau kepala dinas, jadi tunggu saja," kata Gubernur DIY, Sultan HB X di Kompleks Kepatihan, Jumat (13/5).

Seperti yang diketahui bersama masa jabatan Bupati Kulonprogo dan Walikota Yogyakarta akan berakhir pada 22 Mei 2022 mendatang. Sedangkan jabatan definitif, masih harus menunggu hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024. Untuk mengisi kekosongan, diperlukan penjabat Bupati atau Walikota di kedua daerah tersebut.

Sultan mengungkapkan, penjabat bupati dan walikota sebetulnya setingkat kepala dinas. Pihaknya juga masih menunggu informasi dari Pemerintah Pusat. (Ria)-f

## HADAPI RISIKO GLOBAL Menkeu ASEAN+3 Perkuat Kerja Sama

**JAKARTA (KR)** - Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 atau ASEAN+3 Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM+3) ke-25 telah diselenggarakan secara virtual pada 12 Mei 2022. Pertemuan di bawah kepemimpinan Kamboja dan Tiongkok itu membahas strategi dan respons kebijakan regional dalam menghadapi risiko dan tantangan global saat ini. Dalam Pernyataan Bersama AFMGM+3 menyatakan bahwa kerja sama keuangan ASEAN+3 berperan penting untuk mendukung ekonomi kawasan.

Para Menteri Keuangan juga sepakat untuk lebih memperdalam kolaborasi melalui Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), Asian Bond Markets Initiative (ABMI), dan ASEAN+3 Future Initiatives.

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (13/5) menyampaikan, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan oleh setiap negara dalam menyusun kebijakan untuk mengatasi tantangan saat ini. Yakni melindungi kelompok rentan, menjaga momentum pemulihan ekonomi, dan mengembalikan kekuatan instrumen fiskal. Sementara untuk memperkuat kerja sama keuangan regional, Menkeu mendorong penguatan AMRO sebagai lembaga yang berperan dalam memantau dan mengevaluasi stabilitas ekonomi makro di kawasan. (Ant)-f

## UNTUK KELANCARAN PEMILU Parpol Harus Terdaftar di Kemenkumham

**JAKARTA (KR)** - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyetujui partai politik (parpol) yang akan mendaftar untuk mengikuti Pemilu 2024 harus terdaftar di Kemenkumham. Untuk itu, kata Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, Kemenkumham akan mendukung KPU dalam penyediaan data-data parpol untuk kelancaran pelaksanaan pemilu.

Ya juga menegaskan, parpol memiliki legalitas jika terdaftar di Kemenkumham. "Dengan legalitas itu, bisa mendaftar menjadi peserta pemilu," jelas Yasonna H Laoly dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/5).

Parpol, menurutnya, merupakan kewenangan Kemenkumham, sehingga hanya partai yang terdaftar di Kemenkumham yang memiliki kekuatan hukum. Selain itu, ujar Yasonna, Kemenkumham akan mendukung KPU dalam penyediaan data-data parpol untuk kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024.

Sehubungan Pemilu 2024, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, KPU mem-

butuhkan kerja sama dari Kemenkumham terkait data parpol. Pasalnya, data itu akan menjadi dasar dalam pendaftaran serta penetapan partai peserta pemilu.

"Untuk itu, kami mohon Kemenkumham dapat memberikan data nama dan jumlah parpol yang telah sah terdaftar," kata Hasyim seraya menyebutkan, terdapat data-data parpol pemilu sebelumnya yang saat ini sudah berubah. Misalnya, kepengurusan partai dan alamat partai.

Sekarang ini, jelasnya, partai sudah ada yang baru. "Kepengurusan partai yang lama juga sudah berubah termasuk pergantian nama partai," ujar Hasyim.

Selain membahas parpol, Menkumham dan Ketua KPU juga mendiskusikan hak pilih narapidana dan tahanan. Termasuk harmonisasi peraturan KPU untuk Pemilu 2024.

Persoalan lain yang disampaikan adalah Kemenkumham bersama KPU akan membentuk desk khusus bagi narapidana dan tahanan untuk mempercepat proses persiapan data pemilih pada Pemilu 2024. (Ful)-d

## Waspadai Potensi Tsunami Akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau

**JAKARTA (KR)** - Kepala Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Widjo Kongko mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Pakar tsunami tersebut menuturkan, berdasarkan data dan hasil pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi, terdapat peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau dari Waspada atau Level 2 ke Siaga atau Level 3. "Ini menunjukkan adanya potensi ke arah erupsi dan dapat berpotensi menimbulkan tsunami," katanya dalam keterangan pers di laman resmi BRIN di Jakarta, Jumat (13/5).

Untuk perkiraan besar kecilnya dampak tsunami, ia mengatakan tergantung dari pemicu sumbernya, yakni seberapa besar aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dan volume longoran kaldera atau lava yang dimuntahkan.

Menurutnya, hasil kajian pemodelan tsunami yang telah dilakukan untuk kejadian erupsi akhir 2018 dapat dijadikan acuan untuk potensi tsunami ke depan

apabila ada erupsi Gunung Anak Krakatau, terutama memprediksi waktu tiba tsunami di pantai dan perkiraan tingginya.

Widjo Kongko menuturkan, Pemerintah telah berupaya membuat program mitigasi tsunami dari tingkat hulu hingga hilir. Sebagai contoh, di tingkat hulu terdapat sistem peringatan dini apabila akan terjadi tsunami dan diseminasi informasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Di tingkat hilir, sudah dilakukan penyiapan jalur evakuasi, tempat evakuasi (selter) dan panduan perencanaan evakuasi. Meskipun demikian, korban tsunami masih tetap ada seperti yang pernah terjadi di Selat Sunda di akhir 2018.

Hal itu, katanya, menunjukkan program mitigasi tsunami yang telah ada belum mencukupi, sehingga perlu ditingkatkan pada masa mendatang. "Saya kira publik juga perlu mendapatkan informasi secara mendetail terkait potensi ancaman tsunami di lokasi di mana mereka tinggal dan tentu saja informasi lainnya terkait jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara," ujar Widjo. (Ant/San)-f

## JELANG LIBUR BESAR NASIONAL Volume Penumpang KA Meningkat

**JAKARTA (KR)** - Menjelang libur besar nasional, volume keberangkatan pengguna jasa kereta api (KA) jarak jauh dari area Daop 1 Jakarta kembali mengalami peningkatan hampir dua kali lipat jika dibandingkan pada Kamis (12/5).

Pada Jumat (13/5), secara total terdapat 31.200 pengguna KA jarak jauh yang berangkat. Dari jumlah tersebut berangkat dari Stasiun Gambir atau 76 persen dari total tempat duduk yang tersedia dengan layanan 35 KA yang beroperasi, dan 15.500 pengguna berangkat dari Stasiun Pasar Senen atau 72 persen dari total tempat duduk yang tersedia dengan layanan 29 KA yang beroperasi.

"Relasi yang banyak dipilih pengguna di antaranya tujuan

Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Solo, Kutoarjo, Kebumen, Semarang, Tegal, Malang, Cirebon, dan Bandung," ujar Kahumas Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa, Jumat (13/5).

Eva kembali mengingatkan pengguna jasa KA jarak jauh yang akan berangkat agar memperhatikan kembali persyaratan perjalanan KA untuk menghindari risiko batal berangkat karena tidak memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut di antaranya, yang sudah vaksin ketiga (booster) tidak perlu menunjukkan hasil negatif skrining Covid-19.

Kemudian, vaksin kedua wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Test Antigen 1x24 jam atau tes RT-PCR 3x24 jam. Vaksin pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR 3x24 jam, dan

yang tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit Pemerintah dan hasil negatif tes RT-PCR 3x24 jam.

Sementara menurut Eva, untuk kedatangan penumpang dari daerah lain tujuan Daop 1 Jakarta, saat ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata volume kedatangan di masa pandemi. Secara total untuk Jumat kemarin terdapat sekitar 31.000 pengguna yang akan turun di area Daop 1 Jakarta. Dari jumlah tersebut sebanyak 13.000 penumpang turun di Stasiun Gambir, 15.300 di Stasiun Senen, 1.600 di Bekasi dan sisanya merupakan penumpang turun di Stasiun lain seperti Jakarta Kota, Jatinegara, Cikarang, Karawang dan Cikampek. (Imd)-f



KR-Antara/Hafidz Mubarak A

**UPACARA HARDIKNAS: Mendikbudristek Nadiem Makarim memimpin Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di halaman Kemendikbudristek, Jakarta, Jumat (13/5). Peringatan Hardiknas 2022 mengusung tema 'Pimpin Pemulihan, Bergerak untuk Merdeka Belajar'. Beritanya di halaman 10.**